

Pembaharuan Pesantren: Arah dan Implikasi

Wahyudin Noor

Fakultas Tarbiyah
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
wahyu_oche@yahoo.com

Abstract

Pesantren are often associated with backwardness and traditionalism in everything: facilities, technology, learning methods, and even the curriculum. For now, it seems like the traditional term for pesantren is no longer relevant enough. The pace of movement in the era of renewal marked by the rapid development of technology has demanded pesantren to make adjustments. However, on the one hand, when viewed from the direction of change, the reform efforts pursued by pesantren are not to erase the old tradition, but merely to add something new so that the old tradition and conditions can be maintained while accepting the presence of a new one. On the other hand, the reform efforts undertaken by pesantren have implications for the fact that the typical values of the pesantren are fading away.

Keywords: islamic boarding schools, renewal, direction and implications

Abstrak

Pesantren seringkali diasosiasikan dengan keterbelakangan dan tradisional dalam segala hal: fasilitas, teknologi, metode pembelajaran, dan bahkan kurikulumnya. Untuk saat ini, sepertinya istilah tradisional untuk pesantren, sudah tidak lagi cukup relevan. Laju gerak pembaharuan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi telah menuntut pesantren untuk melakukan penyesuaian diri. Kendatipun demikian, di satu sisi, jika dilihat dari arah perubahan, upaya pembaharuan yang ditempuh pesantren tidaklah untuk menghapus tradisi yang lama, tetapi sekadar menambah dengan sesuatu yang baru sehingga tradisi maupun kondisi yang lama bisa dipertahankan sambil menerima kehadiran yang baru. Di sisi yang lain, upaya pembaharuan yang dilakukan pesantren ternyata berimplikasi pada kenyataan akan semakin pudarnya nilai-nilai khas yang dimiliki oleh pesantren.

Kata Kunci: pesantren, pembaharuan, arah dan implikasi

A. Pendahuluan

Pesantren, seringkali disebut sebagai lembaga pendidikan tradisional. Disebut “tradisional”, karena lembaga ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kehidupan sebagian besar

masyarakat Islam Indonesia.¹ Karena itulah, Nurcholish Madjid menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan *indigenous*; produk budaya asli Indonesia.² Berbeda dengan sekolah-sekolah formal (seperti SD, SMP, dan SMA) yang merupakan warisan kolonial.

Selain itu, penyebutan tradisional juga karena pada umumnya pesantren dikelola dan dikembangkan oleh kelompok Islam tradisional (baca: Nahdlatul Ulama) yang berbasis di pedesaan (*rural based institution*). Kelompok tradisional masih kental dengan tradisi dan adat setempat. Dalam hal pemahaman terhadap teks agama, mereka cenderung melakukan pendekatan kontekstual kultural. Karenanya tak heran bila tokoh Islam tradisional cenderung memilih beradaptasi, melakukan asimilasi, dan juga inkulturasi terhadap kebudayaan lokal,³ tidak lantas mencap *bid'ah* sebagaimana yang dilakukan oleh kaum modernis.⁴

Kelompok tradisional juga senantiasa lekat dengan khazanah Islam klasik yang lazim dikenal dengan kitab kuning. Kitab kuning ini menjadi sumber utama yang diaji dan dikaji di pesantren hingga saat ini. Adapun metode pembelajaran yang lazim diterapkan di pesantren adalah metode *bandongan* dan *sorogan*. Dalam sistem *bandongan*,⁵ santri tidak bisa berperan aktif dan hanya mendengarkan dan menuliskan apa yang disampaikan oleh kyai tanpa ada ruang untuk bertanya dan berdiskusi. Sementara dalam metode *sorogan*, para santri menemui sang kyai sambil menyertakan kitab kajian sendiri satu per satu. Dalam hal ini santri biasanya membaca sendiri sedangkan kyai membetulkan bacaan santri dan menjelaskan

¹ Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 55

² Menurut Nurcholish Madjid, lembaga serupa pesantren telah ada sejak zaman Hindu-Belanda di Indonesia. Dengan begitu, pesantren merupakan bentuk pengembangan dan pengislaman terhadap lembaga pendidikan yang sudah ada tersebut. Telaah lebih lanjut, Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3

³ Dalam studi kebudayaan lokal, inkulturasi mengandaikan sebuah proses internalisasi sebuah ajaran baru (baca: Islam) ke dalam konteks kebudayaan lokal dalam bentuk akomodasi atau adaptasi. Inkulturasi dilakukan dalam rangka mempertahankan identitas. Dengan demikian, Islam tetap tidak tercerabut akar ideologisnya, demikian pun dengan budaya lokal tidak lantas hilang dengan masuknya Islam di dalamnya. Baca, Paisun, "Dinamika Islam Kultural (Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal)" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS ke-10) di Banjarmasin 1-4 November 2010* Jilid 1, tt,tp., h. 223

⁴ Istilah "modernis" dan "tradisional" menurut beberapa ahli tidak lagi relevan untuk saat ini. Hal ini karena, NU, yang sering disebut sebagai kelompok tradisional, dalam dalam beberapa hal justru lebih modern daripada Muhammadiyah sebagai kelompok modernis, demikian pun sebaliknya. Pelabelan "modernis" dan "tradisional" ini merupakan konsep lama yang dipopulerkan oleh Clifford Geertz yang cenderung dikotomis. Baca, Ahidul Asror, "Ritual Islam Tradisional: Rekonstruksi Nilai Lokal dan Proses Pembentukannya", *ISTIQRO', Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Volume 06, Nomor 01, 2007, h. 203

⁵ *Bandongan* dilakukan dengan carakyai menuntun membacakan kitab berbahasa Arab, menterjemahkannya sesuai dengan bahasa lokal seraya memberikan penjelasan maksud kandungan kitab. Kegiatan ini dilakukan untuk mendalami kemampuan kognitif para santri dengan memperluas berbagai referensi keilmuan lain. Lih. M. Dian Nafi' dkk., *Praksis Pembelajaran Pesantren* (Tkp: ITD-Forum Pesantren-Yayasan Selasih, 2007), h. 67

lebih detail tentang isi kitab yang dibaca.⁶ Metode seperti inilah yang kemudian disebut sebagai tradisional dan dinilai tidak efektif dalam sistem pembelajaran.

Terlepas dari hal itu, pelabelan “tradisional” pada pesantren seringkali diiringi dengan pandangan stereotip. Di mana, pesantren sering diasosiasikan dengan keterbelakangan dalam segala hal: fasilitas, teknologi, metode pembelajaran, dan bahkan kurikulumnya.⁷ Tata kelola bangunan pesantren pun pada umumnya jauh dari keteraturan. Demikian pun dengan para santrinya yang acapkali *kudisan* karena jarang menjaga kebersihan. Pola pakaian santri yang identik dengan sarung juga acap menjadi legitimasi mencap santri sebagai kaum tradisional.

Namun demikian, penyematan tradisional terhadap pesantren agaknya tidak lagi relevan untuk saat ini. Laju gerak pembaharuan yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi telah menuntut pesantren untuk melakukan penyesuaian diri. Tak sedikit pesantren yang melakukan perubahan mendasar, baik dari sisi metode pembelajaran, kurikulum, maupun pola kepemimpinan. Pesantren pun tak lagi terkonsentrasi di pedesaan, tapi sudah tersebar secara sporadis di berbagai kota besar dan menjadi *jujukan* pendidikan masyarakat urban.

Dari sisi fungsi, pesantren tidak sebatas menjadi lembaga pendidikan keagamaan, namun tak sedikit di antaranya juga menjadi lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pusat pengembangan ekonomi masyarakat.⁸ Dalam posisi ini, pesantren—meminjam istilah Geertz—berfungsi sebagai “*cultural brokers*” (pialang budaya) bagi masyarakatnya.⁹

Kajian ini bermaksud memaparkan perihal dinamika pembaharuan pesantren sejak awal mula ide tersebut dilontarkan, namun secara khusus hendak mengurai-jelaskan arah dan implikasi pembaharuan pesantren. Seberapa jauh arah dan implikasi pembaharuan yang telah dilakukan pesantren dan bagaimana model dan bentuk pembaharuan pesantren yang ideal merupakan kajian utama dalam makalah ini.

B. Pembahasan

1. Arti Pembaharuan Pesantren

Pembaharuan¹⁰ pesantren, dilihat dari perkembangan kebudayaan dan peradaban dunia, merupakan keniscayaan.¹¹ Modernisasi yang diiringi dengan

⁶ Mastuki HS. dkk., *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), h. 89

⁷ Raihani, “Islam dan Kemajemukan Indonesia (Studi Kasus Pesantren dan Pendidikan Multikultural)” dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS ke-10) di Banjarmasin 1-4 November 2010* Jilid 2, tt.pt., h. 5

⁸ Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga lembaga keilmuan, lembaga pelatihan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga bimbingan keagamaan dan juga simpul budaya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, baca, M. Dian Nafi’, dkk., *Praksis Pembelajaran...* h. 11-32

⁹ Dikutip dari Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” pengantar pada buku Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. xxvi

¹⁰ Harun Nasution menyebut gerakan pembaharuan dengan istilah modernisasi. Adapun modernisasi menurut KBBI, merupakan proses pergeseran sikap maupun mentalitas masyarakat agar

perkembangan teknologi yang kian pesat, menuntut pesantren untuk menyesuaikan diri. Mau tidak mau, agar bisa tetap *survive*, pesantren mesti banyak melakukan pembaharuan, baik dari sisi kurikulum, metode pembelajaran, maupun yang lainnya.

Namun sayangnya, ide pembaharuan pesantren, tidak berangkat dari kesadaran internal pesantren sendiri untuk melakukan perubahan. Sebaliknya, pembaharuan pesantren merupakan respon atas sistem pendidikan modern Belanda yang diperkenalkan pada paruh kedua abad ke-19 dan model pendidikan Islam modern yang dikelola kaum reformis.¹²

Meski demikian, catatan sejarah menunjukkan, respon pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional, terhadap sistem pendidikan modern yang diperkenalkan Belanda boleh dibilang lambat, untuk tidak mengatakan tidak sama sekali. Hal ini dapat dipahami mengingat, dalam doktrinasi pesantren, Belanda adalah orang kafir; musuh Islam. Segala hal yang berasal dari orang kafir dianggap tidak baik. Karenanya, tak heran bila sekolah rakyat yang didirikan Belanda cenderung kurang mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Masyarakat tetap menjadikan pesantren tradisional sebagai pilihan terbaik untuk mendidik putra-putri mereka. Sebab, masyarakat tidak ingin anak mereka dididik oleh dan dalam lembaga pendidikan milik orang kafir.

Rangsangan kuat untuk melakukan perubahan dalam pesantren justru datang dari lembaga Pendidikan modern Islam. Dalam hal ini, meminjam bahasa Karel Stenbrink, pesantren cenderung “menolak dan mencontoh” terhadap sistem pendidikan kaum reformis. Dalam posisi ini, pesantren tidak menerima berbagai paham dan asumsi keagamaan para reformer. Namun demikian, di saat yang sama dan pada batas-batas tertentu, pesantren mengikuti dan melaksanakan langkah para reformer, seperti dalam sistem perjenjangan, kurikulum, dan sistem klasikal. Sikap akomodatif dan adaptif ini dilakukan selain untuk mempertahankan eksistensi pesantren, juga bermanfaat untuk meningkatkan intelektualitas santri.¹³

Dengan demikian, sikap lamban pesantren dalam merespon modernitas tidaklah berarti menunjukkan pesantren anti-kemajuan. Namun, pesantren cenderung memilih kebijaksanaan hati-hati (*cautious policy*); pesantren tidak tergesa-gesa untuk mentransformasi pendidikan tradisional menjadi model Pendidikan modern Islam seperti yang dikelola kaum reformis.¹⁴ Sikap ini

dapat bertahan hidup dari tuntutan kehidupan saat ini. Lih. Abd. Rachman Assegaf, *Pendidikan Islam Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 88

¹¹ Azyumardi Azra, “Pembaharuan Pendidikan Islam: Sebuah Pengantar” pada buku Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Depag RI, 1996), h. 13

¹² Dalam hal ini, setidaknya terdapat dua model pendidikan Islam yang dikelola kaum modernis: *pertama*, sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pelajaran agama Islam. *Kedua*, madrasah-madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Model Pendidikan modern Islam ini dalam beberapa hal dianggap mengancam terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional. Lihat, Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”..., h. xiv

¹³ *Ibid.*, h. xiv-xv. Bandingkan dengan Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 28-29

¹⁴ *Ibid.*, h. xvi

berpegang teguh pada kaidah yang sangat populer di pesantren, yakni *Al-Muhafdzah ala al-Qadimi al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah* (Melestarikan tradisi lama yang baik serta mengadopsi tradisi baru yang lebih baik). Karenanya, dapat dipahami jika sekalipun suatu pesantren banyak melakukan pembaruan, namun sistem pendidikan lama seperti *bandongan* dan *sorogan*, tetap dipertahankan.

Dalam konteks pesantren, khususnya di Jawa, pesantren Mambaul Ulum Surakarta misalnya, dianggap sebagai pelopor pembaruan pesantren, yakni dengan memasukkan materi pelajaran umum dalam pendidikan pesantren. Adapun materi umum dimaksud meliputi adanya pembelajaran tentang huruf latin, berhitung dan aljabar pada kurikulumnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pesantren Tebuireng pada tahun 1916, yakni dengan mendirikan “Madrasah Salafiyah”. Dalam madrasah ini, yang diajarkan bukan hanya pendidikan agama, tapi juga beberapa pelajaran umum seperti berhitung, bahasa Melayu, ilmu bumi, dan menulis dengan huruf latin ke dalam kurikulumnya.¹⁵ Di pesantren inilah banyak dilakukan pembaharuan terhadap pesantren. Pengalaman hidup di lingkungan pesantren selama bertahun-tahun, disertai dengan pengetahuan yang luas sebagian kyai yang memantik semangat untuk senantiasa menghadirkan pembaharuan di pesantren demi perbaikan dan peningkatan kualitas lulusan.

2. Arah Pembaharuan Pesantren

Secara historis pesantren dikenal sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang diperkenalkan di Jawa sekitar 500 tahun yang lalu, dengan kyai sebagai tokoh sentralnya dan masjid sebagai pusat lembaganya. Umumnya, pola pendidikan di pesantren dilaksanakan dalam dua sistem pengajaran, yaitu sistem sorogan, yang melibatkan santri secara individual, dan sistem wetonan yang melibatkan santri secara kolektif. Isitlah “pesantren” sendiri secara semantis dan historis masih diperselisihkan asal muasalnya, sedangkan “pondok” berasal dari bahasa Arab “*funduq*” yang berarti “penginapan”, yang dalam perkembangannya, sekarang menjadi salah satu padanan kata untuk “hotel”. Pesantren (pesantrian), dengan awalan pe- dan akhiran -an berasal dari kata *santri*, bahasa Tamil yang berarti para penuntut ilmu, atau diartikan juga guru ngaji.¹⁶

Belum diketahui secara persis tahun berapa pesantren pertama kali muncul sebagai pusat pendidikan agama di Indonesia. Agama Islam mulai menyebar di seluruh Indonesia kira-kira abad ke-15, tetapi diperkirakan sudah datang ke Indonesia pada abad ke-8 melalui para pedagang Arab. Sampai abad ke-16 agama Islam telah tersebar dan merupakan agama yang paling besar di seluruh nusantara Indonesia. Pesantren yang paling lama namanya Tegalsari di Jawa Timur. Tegalsari

¹⁵ *Ibid.*, h. xv. Model pendidikan ini kemudian banyak diikuti oleh pesantren-pesantren lainnya karena dipandang efektif dan dapat melahirkan santri yang tidak hanya ahli agama, tapi juga cakap dalam ilmu umum.

¹⁶ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 145

didirikan pada akhir abad ke-18, walaupun sebetulnya pesantren di Indonesia mulai muncul banyak pada akhir abad ke-19.¹⁷

Menurut penuturan Babad Demak, sebuah literatur klasik Jawa, pesantren pertama kali tumbuh pada masa Raden Rahmat (Sunan Ampel) bersamaan dengan periode kekuasaan Prabu Kartawijaya di Majapahit. Tujuan utamanya adalah mencetak calon kyai atau ulama.¹⁸ Adapun menurut Babad Tanah Jawa, pesantren pertama di Jawa Barat adalah pesantren Quro (*Qurra'*) di Tanjung Pura, Karawang yang didirikan oleh Syaikh Hasanuddin, seorang ulama berdarah Makkah, yang melakukan perjalanan da'wah dari Champa (Vietnam Selatan), pada tahun 1412 Saka (1491 M). Syaikh Quro datang bersama armada laut Laksamana Cheng Ho yang sedang berlayar menuju Majapahit, namun ketika rombongan singgah di Karawang, Syaikh Quro memilih untuk menetap di sana dan mendirikan pesantren pengajaran al-Qur'an. Disebut Quro (*qurra'* dalam bahasa Arab berarti "para pembaca al-Qur'an"), karena Syaikh Hasanuddin (yang dikenal di Jawa Barat dengan sebutan Syaikh Quro) adalah seorang ahli al-Qur'an, pesantren ini pun awalnya didirikan sebagai sarana pendidikan al-Qur'an dan syiar Islam, inilah cikal bakal pesantren di Jawa Barat. Sampai saat ini makam Syaikh Quro masih ada di Desa Pulo Kalapa, Lemahabang Karawang.

Sejak semula, ketika pesantren didirikan pertama kali oleh para wali (yang masyhur dengan *Walisono*), adalah semata-mata ditujukan untuk membentuk manusia paripurna (*insan kamil*). Hal ini mengindikasikan makna –meminjam istilah Kuntowijoyo- humanisme-teosentrik, yakni pengabdian secara total kepada Allah SWT, namun manfaatnya dirujukan bagi kesejahteraan alam semesta.¹⁹ Dengan demikian peranan pesantren, dengan ulama sebagai motor penggeraknya, memainkan peran sentral membangun peradaban nusantara dari berbagai segi dan terutama sekali perbaikan sosial yang kekuatan dan motif dibaliknya adalah motif penghambaan kepada Allah, bukan semata-mata motif rasional dan manusiawi.

Tidak sederhana memang menjelaskan asal usul pesantren dari, baik secara historis ataupun semantis, namun berarti sama sekali tidak dapat dilacak. Hanya saja diperlukan studi interdisipliner untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif tentangnya. Karena masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dengan mudah membedakan antara pesantren dengan sekolah umum atau dengan madrasah. Pengertian atau *ta'rif* pondok pesantren tidak dapat diterangkan dengan batasan lebih tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan pengertian pondok pesantren.²⁰ Setidaknya ada lima elemen penting yang terdapat pada suatu lembaga pondok pesantren, yakni kyai, santri, pengajian, asrama dan masjid dengan aktivitasnya.

¹⁷ Marwan Saridjo, dkk., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Darma Bakti, 1983), h. 14

¹⁸ Suwito dan Fauzan (ed.), *Perkembangan Pendidikan Nusantara (Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M)*, (Bandung: Angkasa, 2004), h. 206

¹⁹ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kyai; NU, Pesantren dan Kekuasaan, Pencarian Tak Kunjung Usai*, (Yogyakarta: Kutub, 2003), h. 36

²⁰ Suwito dan Fauzan (ed.), *Perkembangan...*, h. 208

Sedikit lebih melakukan spesifikasi aktivitas pesantren, Dhofier²¹ menganggap bahwa pesantren tidak lepas dari lima unsur dasar yang melekat dan tetap dipertahankan sebagai ciri khas tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) dan kyai/guru mengaji. Sehingga bila semua unsur-unsur tersebut digabung, maka dapat dibuat pengertian pondok pesantren yang bebas. Sedangkan kegiatannya mencakup “Tri Darma Pondok Pesantren”, yakni: a). Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT; b). Pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan c). Pengabdian terhadap agama, masyarakat dan negara.

Pada perkembangan berikutnya, bahkan terdapat dalam catatan sejarah, pesantren menjadi saksi bisu bagi dua hal penting, yaitu perkembangan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan pertumbuhan Islam sebagai agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduk nusantara. Dalam kerangka pertama, pesantren turut memberi sumbangan penting bagi terbangunnya nasionalisme Indonesia awal. Gerakan-gerakan pro-nasionalis yang mulai tumbuh sejak abad ke-18 banyak berhimpun di seputar pesantren dan guru-guru agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari perang Paderi di Sumatera Barat, perang Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1930), Gerakan Petani Banten (1888), hingga Sarekat Islam pada awal abad 20. Sedangkan dalam kerangka kedua, pesantren menjadi pusat pengembangan agama Islam yang paling utama dan terlembagakan. Dalam pengembangan Islam tersebut, pesantren di nusantara mengambil model yang khas dan berbeda dari Islam di Timur Tengah. Pesantren menghadirkan suatu bentuk Islam Nusantara yang unik, namun dengan berbagai kompleksitasnya.²²

Meski demikian, terdapat permasalahan pelik yang dihadapi pesantren, karena di satu sisi pesantren memiliki identitas dan berupaya mempertahankan identitasnya tersebut. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan dengan tujuan untuk menanamkan dan memperdalam ajaran Islam melalui serangkaian pengajaran kitab-kitab kuning yang rata-rata memuat ketentuan-ketentuan tentang keimanan, ibadah dan perilaku yang baik atau akhlak *karimah*. Dengan pengertian lain, pendidikan pesantren berorientasi pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bekal dalam menghadap Allah atau bekal untuk akhirat. Sedangkan pada sisi lain, telah banyak berdiri sekolah-sekolah sekuler di sekitar pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu umum berkaitan dengan pengembangan sains dan teknologi. Dengan kata lain, sekolah sekuler ini berorientasi pada kekinian, kerja atau material.

Pada 1950-an ada gerakan pendidikan yang dimobilisasi pemerintah untuk mengakselerasi kecerdasan masyarakat dengan didirikan sekolah-sekolah umum sebagai bentuk kebijakan popularisasi pendidikan sehingga gelombang pendidikan ini menghantam eksistensi pesantren. Kasus yang hampir sama dialami pesantren

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 43

²² Choirul Fuad Yusuf, “Dinamika Pesantren di Tengah Arus Perubahan”, dalam Balitbang Depag RI, *Pesantren, Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag RI dan Labsosio UI, 2009), h. 1-2

pada 1970-an, bersamaan dengan gencar-gencarnya sekularisasi memasuki Indonesia.²³

Laju perubahan ini tidak lantas direspons oleh semua pesantren. Ada sebagian pesantren yang tetap seperti semula, hanya mengajarkan pelajaran agama, tanpa memasukkan pelajaran umum sebagai kurikulum resminya. Kalaupun ada, pengetahuan dan keterampilan umum tersebut hanya diakomodasi dalam kegiatan ekstrakurikuler saja. Sehingga, atas dasar itu kita mengenal kategori pesantren *salaf* (tradisional) dan *khalaf* (modern). Pesantren salaf adalah pesantren yang masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) sebagai materi kurikulum tanpa memasukkan pengetahuan umum. Pesantren kategori ini diantaranya Pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Sarang di Rembang dan sebagainya. Sedangkan pesantren khalaf adalah pesantren yang sudah memasukkan pengetahuan umum sebagai materi pengajaran di sekolah dan madrasah yang dikembangkannya. Pesantren khalaf juga terklasifikasikan dalam dua model. *Pertama*, pesantren yang juga tetap mempertahankan pengajaran pengetahuan agama berbasis kitab kuning dengan metode bandongan dan sorogan, seperti Pesantren Tebuireng dan Denanyar di Jombang, Pesantren Qomaruddin di Gresik dan lain-lainnya. *Kedua*, pesantren yang sama sekali tidak mengajarkan kitab kuning, seperti Pesantren Krapyak di Yogyakarta, Pesantren Gontor di Ponorogo dan sebagainya.²⁴

Pada masa-masa itu merupakan masa sulit bagi pesantren karena menghadapi dilema serius. Dalam kasus 1950-an saja misalnya, banyak pesantren kecil gulung tikar. Sedangkan pesantren-pesantren besar masih bertahan hidup dengan cara memasukkan atau mendirikan sekolah-sekolah umum ke dalam pesantren sehingga banyak pesantren besar yang menempuh cara ini. Implikasinya di berbagai pesantren besar, pengajian kitab kuning dengan model pembelajaran lama tetap dipertahankan dan menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti kurikulum pemerintah dan pendekatan pembelajaran yang baru, yang tentu berbeda dari model pembelajaran lama.

Cara ini tampaknya harus ditempuh pesantren karena pesantren harus menentukan sikap. Dari berbagai sikap yang mungkin ditempuh, agaknya sikap mengikuti kecenderungan masyarakat secara umum yang dipilih karena menguntungkan masa depan pesantren meskipun harus mengorbankan pendiriannya semula. Untuk menggambarkan keadaan ini sebagaimana dikutip Azra, Karel A. Steenbrink melukiskan situasi tersebut sebagai 'menolak sambil mengikuti'.²⁵ Pada zaman penjajahan Belanda misalnya, kalangan pesantren sebelumnya menolak sistem pendidikan atau sistem pembelajaran yang menggunakan meja, bangku, papan tulis dan sebagainya. Namun setelah pesantren

²³ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 14

²⁴ Rokhmad, "Pesantren Salaf di Tengah Pragmatisme", *Jurnal Kebudayaan dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 18. No. 2 Tahun 2003, h. 157

²⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 99

terdesak pada 1950-an, sistem pembelajaran yang selama ini ditolak kemudian diikuti.

Sikap pesantren tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, mengapa terjadi perubahan sikap secara drastis, dari sikap menolak kemudian tiba-tiba mengikuti atau setidaknya mentoleransi? Agaknya yang dijadikan pertimbangan kalangan pesantren tidak lagi faktor ilmiah, tetapi faktor-faktor lainnya seperti faktor politik, emosi, dan kefanatikan yang berlebihan sehingga menyebabkan rapuhnya suatu pendirian.

Dalam menghadapi pendidikan sekuler, pesantren menghadapi berbagai desakan baik menyangkut manajemen, kepemimpinan, sistem pendidikan, institusi, kurikulum maupun metode. Akhirnya terjadi transformasi manajemen; transformasi kepemimpinan, dari kepemimpinan individual kyai menuju kepemimpinan kolektif yayasan; transformasi sistem pendidikan, dari sistem pendidikan yang bercorak independen berubah menjadi sistem pendidikan adaptif dan terkait; transformasi institusi, dari sekedar masjid dan asrama (pondok) berkembang dengan menambah madrasah, sekolah dan perguruan tinggi; transformasi kurikulum, dari penyajian materi-materi keislaman, ibadah dan akhlak berkembang dengan menambah materi umum dan keterampilan; dan transformasi metode, dari metode-metode tradisional berubah menjadi metode-metode kombinasif.²⁶

Perubahan-perubahan dalam pola pendidikan di pesantren tersebut sejatinya menurut Abdurrahman Wahid disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, keinginan sangat kuat pada permulaan abad ke-20 untuk menerapkan sistem sekolah pada pendidikan di pesantren yang dimulai beberapa pesantren di Sumatera dan Pesantren Tebuireng Jombang; dan *kedua*, pergeseran secara halus tujuan pendidikan di pesantren dari penciptaan pengertian merata tentang ilmu-ilmu pengetahuan agama berubah menjadi pendalaman ilmu-ilmu pengetahuan agama untuk dijadikan landasan menempuh karier tertentu yang umumnya sebagai tenaga pengajar agama.²⁷

Di samping itu, fenomena ini sejatinya juga menunjukkan indikasi dari ketahanan pesantren menghadapi gelombang pembaharuan, dan tentunya ada strategi tertentu yang menjadi faktor ketahanan tersebut. Menurut Abdurrahman Wahid,²⁸ ketahanan pesantren itu disebabkan pola kehidupannya yang unik. Bagi Sumarsono Mestoko,²⁹ ketahanan ini disebabkan telah melembaganya pesantren di dalam masyarakat. Azyumardi Azra³⁰ menilai ketahanan pesantren disebabkan oleh kultur Jawa yang mampu menyerap kebudayaan luar melalui proses interiorisasi

²⁶ Mujamil Qomar, *Pesantren...*, h. 27-153

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (ttp: CV. Dharma Bhakti, tt.), 102-103

²⁸ Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur", dalam Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 43

²⁹ Sumarsono Mestoko, et. al., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 232

³⁰ Azyumardi Azra, "Surau di Tengah Krisis: Pesantren dan Perspektif Masyarakat", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 173

tanpa kehilangan identitasnya. Hasan Langgulung³¹ mengamati ketahanan pesantren itu sebagai akibat dari pribadi-pribadi kyai yang menonjol dengan ilmu dan visinya. Sedangkan Ali Ma'shum seperti dikutip Ismail S. Ahmad³² mengemukakan ketahanan pesantren sebagai akibat dari dampak positif dari kemampuan melahirkan berbagai daya guna bagi masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas, mengisyaratkan bahwa penyebab internal lebih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan pesantren dibandingkan penyebab eksternal dalam merespons pembaharuan. Ini berarti pesantren memiliki potensi yang luar biasa dalam menangkal arus dan gelombang perubahan pendidikan yang telah, sedang, dan akan terus bergulir menawarkan berbagai perubahan. Namun, lebih dari itu, pesantren juga senantiasa aktif merespons perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya dengan caranya sendiri.

Dengan demikian, respons pesantren terhadap perubahan-perubahan akibat arus dan gelombang modernisasi khususnya yang menyangkut model sekolah Barat (sekuler) tersebut, dapat dibuat catatan untuk menjelaskan arah baru pembaharuan pesantren:

- a. Perubahan yang ditempuh pesantren tidak menghapus tradisi yang lama, tetapi sekadar menambah dengan sesuatu yang baru sehingga tradisi maupun kondisi yang lama bisa dipertahankan sambil menerima kehadiran yang baru.
- b. Respons pesantren terhadap gelombang pembaharuan itu tidak dilandasi pertimbangan ilmiah (rasional dan kenyataan empiris) yang matang, tetapi lebih mempertimbangkan faktor politis, emosi dan rasa fanatik sehingga pendirian pesantren menjadi labil atau mudah berubah-ubah dalam garis yang *zig-zag*.
- c. Respons pesantren terhadap gelombang pembaharuan itu telah memperkuat kecondongan dan penguatan orientasi ekonomi dan serba perhitungan materi seperti masuknya sekolah dan perguruan tinggi, pembentukan tenaga pengajar agama, perubahan status madrasah menjadi negeri dan pendidikan dengan uang.³³

3. Implikasi Pembaharuan Pesantren

Sebagai lembaga yang merupakan potret Islam Indonesia, kontinuitas keberadaan pesantren yang bisa eksis hingga saat ini tentu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Tetapi ada semacam nilai yang terkandung di dalamnya sehingga pesantren memiliki daya tahan yang kuat dalam sejarah keberlangsungannya. Dunia pesantren, meminjam kerangka Hossein Nasr, adalah dunia tradisional Islam, yakni dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada

³¹ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), h. 75

³² Ismail S. Ahmad, dkk (ed), *Ajakan Suci*, (ttp: LTN-NU DIY, 1995), h. 108

³³ Mujamil Qomar, *Menggagas Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 8-9

periode tertentu dalam sejarah Islam, seperti periode kaum salaf, yakni periode para sahabat Nabi dan tabi'in. Istilah salaf bagi kalangan pesantren mengacu pada pengertian "pesantren tradisional" yang justru sarat dengan pandangan dunia dan praktik Islam sebagai warisan sejarah, khususnya bidang syari'ah dan tasawuf.

Karena itu, tetap bertahannya pesantren agaknya implisit mengisyaratkan bahwa tradisi dunia Islam dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan di tengah arus perubahan global, meski bukan berarti tanpa kompromi sama sekali. Di sini pada awalnya pesantren menghadapi dilema. Pesantren menghadapi pilihan yang tidak mudah, yaitu antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan duniawi. Di satu sisi, sebagai lembaga pendidikan *tafaqquh fi al-din*, pesantren dituntut melahirkan generasi yang mumpuni dalam ilmu-ilmu agama. Pada sisi lain, pesantren dituntut untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat modern yang tidak seluruhnya bisa dipecahkan dengan ilmu agama.

Meski demikian, memang pada mulanya pesantren tampak "enggan" menerima pembaharuan, tapi secara gradual pesantren kemudian melakukan akomodasi dan konsesi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang dipandang cukup tepat untuk menghadapi perubahan yang kian cepat. Tapi satu hal yang pasti, semua akomodasi dan penyesuaian itu dilakukan pesantren tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal dasar lainnya dalam eksistensi pesantren.

Pada titik inilah sesungguhnya pesantren mampu bertahan bukan hanya karena kemampuannya untuk melakukan *adjustment* dan *readjustment*. Tapi lebih dari itu, karena karakter eksistensial pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga keindonesiaan. Dengan kata lain, pesantren berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Pesantren juga mempunyai keterkaitan yang erat yang tak terpisahkan dengan komunitas lingkungannya. Kenyataan ini bisa dilihat tidak hanya dari latar belakang pendirian pesantren pada satu lingkungan tertentu, tetapi juga dalam pemeliharaan eksistensi pesantren itu sendiri melalui pemberian wakaf, sadaqah, hibah dan sebagainya. Sebaliknya pun pesantren juga punya sumbangsih terhadap lingkungannya dengan berbagai bentuk. Dari mulai pelayanan pendidikan dan keagamaan hingga sampai pada bimbingan sosial, kultural serta ekonomi bagi masyarakat lingkungannya.

Dari upaya pembaharuan sistem pendidikan tersebut, setidaknya memberikan gambaran bahwa pesantren juga sangat sulit untuk dapat lepas keterkaitannya dengan lingkungan. Di samping itu juga sulit rasanya bagi pesantren untuk dapat melepaskan diri dari pengaruh *worldview* epistemologi ilmu pengetahuan modern. Dalam ranah tradisi ilmu pengetahuan, modernitas berakar pada sejarah proyek pencerahan di Barat yang ditandai dengan slogan populernya "*sapere aude!*" atau "beranilah berpikir mandiri!". Akibatnya, otoritas kelembagaan atau keagamaan dalam transmisi keilmuan tidak lagi memiliki gaung dan krisis identitas. Otoritas kemudian dipegang oleh rasionalitas dan empiritas. Maka, segala sesuatu yang rasional dan dapat diceraap oleh indera, dapat diterima sebagai kebenaran. Hal-hal yang berbau mitos, tradisi dan sakralitas, dibuang jauh-

jauh. Pengembangan rasionalisme dan empirisme kemudian dibangun menjadi sistem epistemologi pengetahuan manusia yang diberhalakan.³⁴

Lebih jauh, Habermas menyatakan bahwa secara esensial, watak pembaharuan merupakan sebuah cara berpikir yang tidak mau menerima tradisi tanpa refleksi dan evaluasi ulang. Ia menekankan bahwa pembaharuan dapat dan meminjam lagi kriteria-kriteria yang mengambil orientasinya dari model-model yang disalurkan dari masa yang lain. Pembaharuan harus menciptakan normativitas keluar dari dirinya. Secara jelas, cara berpikir ini berhubungan dengan metode ilmiah dan khususnya mekanisme di mana adopsi teknologi ilmiah mungkin menjadi tantangan aspek-aspek kehidupan sosial dan kultural. Kemudian Habermas menegaskan, pembaharuan benar-benar menjadi tantangan dan mengganti tradisi.³⁵

Jadi, epistemologi pengetahuan yang selalu dipegang pembaharuan dan sangat mempengaruhi *worldview* masyarakat saat ini –pada tingkat-tingkat tertentu tentu juga akan memengaruhi pesantren- adalah skeptisisme metodis Cartesian dan pragmatisme Baconian. Skeptisisme metodis yang disebut Descartes (1596-1650) “metode kesangsian” (*le doute methodique*) adalah cara memperoleh kebenaran dalam pengetahuan yang bertujuan menemukan “kepatian dasariah dan kebenaran yang kokoh” (*fundamentum certum et inconcussum veritatis*). Metode ini mengharuskan keraguan atas segala hal. Tak ada pengetahuan yang begitu saja bisa diterima tanpa dipertanyakan dan diuji. Karena itu suatu otoritas religius seperti wahyu atau kitab suci dan sabda nabi juga harus diragukan dan dipertanyakan. Pada akhirnya pembuktian yang paling dianggap handal adalah metode ilmiah (*scientific method*) yang bersifat positifistik.³⁶

Sedangkan pandangan pragmatisme yang membawa semangat dari pandangan Francis Bacon (1561-1626) adalah bahwa ilmu harus digunakan untuk menguasai alam, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan intelektual. Paradigma epistemologi yang antroposentris ini memiliki asas tujuan untuk melakukan eksplorasi semaksimal mungkin. Ini tercermin dalam jargonnya “pengetahuan adalah kuasa” (*knowledge is power*). Semangat yang tertanam dalam pencarian ilmu adalah fungsionalisasi untuk menguasai alam. Yang menjadi perhatian utama adalah memahami dan mematuhi hukum-hukum alam untuk menguasainya. Dengan itu diharapkan manusia akan memasuki kehidupan serba sejahtera. Dengan pandangan dasar ini pendidikan lebih terarah pada keterampilan teknis dan ilmu-ilmu alam (*natural sciences*). Metode yang digunakan bahkan dijadikan metode standar untuk ilmu-ilmu lain karena kehandalannya dalam pembuktian empiris atas fenomena alam.³⁷

Tidak hanya itu, dalam ranah kultur, pembaharuan sebagai “oleh-oleh” globalisasi, oleh Wallerstein disebut sebagai “rel” bagi ekspansi faham kapitalisme

³⁴ Slamet Johannes Purwadi dan Ferry Muhammadiyah Siregar, *Pesantren dan Tantangan Modernitas di Indonesia*, Laporan Penelitian, dalam <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-04.pdf>, diakses 28 Juni 2015

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Maimun Syamsuddin, “Hermeneutika Cangkolang dalam Proses Pendidikan Berbasis Moral” *Jurnal Edukasi*, Sumenep, diakses di <http://jurnal-edukasi.blogspot.com>, tanggal 28 Juni 2015

³⁷ *Ibid.*

dan materialisme. Munculnya gaya hidup instan, pop, glamour dan hedonis yang merupakan “surga” bagi kapitalisme global yang secara terus menerus ditransmisikan pada segenap penduduk dunia melalui teknologi informasi canggih.

Upaya pembaharuan sistem pendidikan pesantren dan pengaruh negatif modernitas pada titik ini berimplikasi dan berkontribusi pada kenyataan semakin pudarnya nilai-nilai khas yang dimiliki pesantren, seperti kesederhanaan, kemandirian, ke-*wara*'-an dan yang lainnya yang selama ini disandang oleh warga pesantren. Lebih jauh dari itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh temuan Ahmad Salehudin,³⁸ pembaharuan lembaga pendidikan pesantren juga mengakibatkan semakin lemahnya penguasaan santri terhadap ilmu-ilmu agama karena semakin banyaknya mata pelajaran umum yang dibebankan pada santri. Hal ini mungkin disebabkan penetrasi nilai-nilai pragmatis dan materialistis ke dalam pesantren.

Di samping itu, pembaharuan pesantren yang dilakukan selama ini sejatinya masih belum sepenuhnya dianggap masyarakat muslim sebagai pilihan pendidikan. Umat Islam cenderung mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah pemerintah dengan kurikulum modern yang dipercaya akan lebih dapat mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam pasar kerja.³⁹ Bahkan banyak dari putera-puteri kyai pesantren yang lebih condong kuliah di perguruan tinggi umum dari pada memperdalam kitab-kitab kuning di pesantren yang lebih maju. Akhirnya mereka tidak lagi mewarisi keulamaan orang tua mereka, tetapi menjadi dokter, insinyur, ahli hukum dan sebagainya. Betapun pesantren telah berusaha menyesuaikan dengan pendidikan Islam modern sehingga telah mengalami perubahan-perubahan, kesan masyarakat muslim tetap saja belum berubah bahwa pesantren berorientasi pada pengabdian. Sedangkan sekolah atau perguruan tinggi umum berorientasi pada pembentukan tenaga-tenaga profesional yang mampu menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan terutama melalui sektor jasa keahlian.

Perubahan-perubahan pola pendidikan di pesantren tersebut secara garis besar pada akhirnya dapat mengikis kemandirian pesantren yang semula memiliki otoritas secara leluasa dalam menentukan model dan corak pendidikan sesuai dengan keinginan kyai, berangsur-angsur –terutama dalam batas-batas tertentu– menjadi serba terikat oleh kebijakan penyeragaman yang dikenal dengan kebijakan sistematisasi pendidikan, baik menyangkut tujuan institusional, kurikulum, metode pembelajaran maupun evaluasi.

Hal ini dalam pandangan Abdurrahman Wahid⁴⁰ dinilai sebagai krisis identitas sebagai implikasi pembaharuan pesantren. Ia menegaskan bahwa lantaran perubahan itu sistem pendidikan pesantren mengalami krisis identitas luar biasa. Di satu pihak, pesantren tetap memiliki watak populisnya lantaran elastisnya program

³⁸ Ahmad Salehudin, “Dilema Pesantren Salaf di Tengah Penetrasi dan Pragmatisme Masyarakat; Studi Kasus Pondok Pesantren al-Falah Jember Jawa Timur”, *Laporan Penelitian Sosial*, (Jakarta: Depag, 2007), h. 51-7

³⁹ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva YM, dkk., (Bandung: Mizan, 2001), h. 9

⁴⁰ Abdurrahman Wahid, *Bunga...*, h. 103-104

pendidikan individual minimal dalam pengajaran ekstrakurikuler berbentuk pengajian; di pihak lain, kecenderungan untuk menumbuhkan pendidikan berwatak elitis juga berjalan cukup kuat. Krisis identitas ini sebagai akibat dari kesulitan mendamaikan kedua watak yang saling bertentangan ini hingga sekarang belum teratasi.

Meski demikian, dilema krisis identitas pesantren tersebut tidak untuk dilestarikan, melainkan harus segera dicarikan solusi yang tepat sehingga tidak lagi mengganggu upaya pengembangan pesantren. Hasyim Muzadi menambahkan, bahwa dalam menghadapi realitas kekinian, kita tidak harus skeptis dalam menerapkan metodologi dan tidak usah mengacak-acak modernitas, atas nama keharusan perubahan itu sendiri. Tradisi menjadikan agama bercokol dalam masyarakat harus lebih kreatif dan dinamis sebab mampu bersenyawa dengan aneka ragam unsur kebudayaan. Sedangkan modernitas tetap perlu guna terobosan-terobosan baru di bidang pemikiran atau IPTEK tidak sampai tersandung. “Maka harus ada kesesuaian antara penguasaan materi agama dengan kemampuan nalar, sehingga ada sinergi antar keduanya, jangan sampai doktrin agama dimaknai secara sempit.”⁴¹

Oleh karena itu, kalangan pesantren perlu menempuh strategi tertentu dalam menghadapi kecenderungan sistem pendidikan sekuler atau sekolah sekuler untuk menghindari benturan antara tradisi dengan modernisasi melalui pengejawantahan slogan *al-Muhafdzah ala al-Qadimi al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah* (Melestarikan tradisi lama yang baik serta mengadopsi tradisi baru yang lebih baik) secara konsisten dan seimbang.

Berdasarkan slogan ini, sistem pendidikan pesantren yang perlu dikembangkan adalah sistem pendidikan yang menggabungkan keunggulan tradisi pesantren dan keunggulan unsur-unsur modernitas dari sistem pendidikan sekuler atau sekolah sekuler sehingga mencerminkan lembaga yang benar-benar memberikan pengajaran, pendidikan, tradisi penelitian dan penulisan karya ilmiah serta pada gilirannya menghasilkan santri yang unggul keimanannya, intelektualnya, keterampilannya, amalnya, akhlaknya dan semangat pengembangannya.

Beberapa langkah yang mungkin layak dipertimbangkan demi kemajuan pesantren di masa depan antara lain;⁴² *pertama*, terkait persoalan kepemimpinan. Kita meyakini sepenuhnya tidak akan pernah menggugat kepemimpinan yang sentralistik dalam pesantren, karena memang itulah ke-khas-an pesantren, khususnya pesantren salaf, dan karena memang pesantren biasanya berdiri atas usaha pribadi sang kyai. Yang mesti dilakukan yakni mengadakan pembaharuan di lini di bawah kyai. Pembaharuan dapat dilakukan misalnya, pada penataan manajemen pesantren dan penyiapan secara serius generasi-generasi di bawahnya

⁴¹ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama, di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta: Logos, 1999), h. 121

⁴² Achmad Maulani, “Pesantren dan Islam Indonesia; Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif”, dalam Amien Haedari (ed.), *Pesantren dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Puslitbang Pend. Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h. 277-280

kyai. Hal ini dimaksudkan demi menjaga kelangsungan keberadaan pesantren jika sewaktu-waktu kyai meninggal dunia. Karena seringkali sebuah pesantren yang awalnya memiliki ribuan santri tiba-tiba lambat laun redup dan mati karena ditinggal wafat sang kyai. Karena itu ke depan hal ini harus diantisipasi dengan langkah yang terprogram dengan baik. Dengan antisipasi tersebut keberlangsungan pesantren dengan seluruh modal besar yang dimiliki bisa dijaga.

Kedua, pembenahan di bidang metodologi. Telah umum diketahui bahwa pesantren mempunyai tradisi yang sangat kuat di bidang transmisi keilmuan klasik. Namun, karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses transmisi akhirnya kerap kali melahirkan penumpukan keilmuan. Pada ranah inilah Martin van Bruinessen,⁴³ yang sering terjadi di pesantren selama ini adalah sebuah ilmu yang dianggap sesuatu yang bulat dan tidak dapat ditambah. Paradigma inilah yang sesungguhnya penting untuk dikaji ulang. Sesungguhnya proses transmisi keilmuan masih bisa dipertahankan, karena ia akan menyambungkan mata rantai keilmuan sebagai salah satu tradisi dalam *ahlussunnah wal jama'ah*. Hanya yang diperlukan adalah proses kreatif yang juga harus ditumbuhkan di pesantren, sehingga betul-betul terjadi pengkayaan pengetahuan dan juga ijtihad ilmu pengetahuan. Dengan demikian, proses transmisi yang berlangsung di pesantren tidak hanya sekedar *taken for granted*. Karena ketika yang terjadi adalah proses transmisi yang *taken for granted* maka pengajaran yang berlangsung akan berdampak pada lemahnya kreativitas. Dan ketika yang dipahami adalah persoalan fiqh, yang selama ini memang menjadi penekanan utama dalam ajaran pesantren maka dampaknya penerapan fiqh dalam masyarakat akan menjadi teralienasi dengan realitas sosial. Selain itu juga akan terjadi jurang yang lebar dengan keilmuan teknologi kontemporer yang saat ini berkembang pesat dan menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari.

Ketiga, dan ini yang sering dialami adalah soal disorientasi. Seringkali pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang terjadi. Di era yang terus berubah dengan cepat ini, pesantren sering mengalami dilema antara keharusan mempertahankan jati dirinya dengan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar. Karena itu, pesantren dalam hal ini dituntut untuk melakukan reorientasi terhadap peran-peran pendidikan, keagamaan dan peran sosial yang pernah diembannya. Maka hubungan interaktif antara pesantren dengan masyarakat tetap harus dipertahankan.

Keempat, jaringan antar pesantren. Kita tahu jumlah pesantren yang ada di Indonesia jumlahnya ribuan. Tak jarang, dalam sebuah desa jumlah pesantren bisa lebih dari satu. Kasus yang seringkali terjadi adalah terdapat sebuah pesantren yang begitu pesat perkembangannya –baik sistem pendidikannya, bangunan fisiknya, jumlah santrinya – tetapi pada saat bersamaan terdapat pesantren yang hampir mati suri. Jaringan antar pesantren ketika mampu dibangun dengan baik, maka keberadaan pesantren benar-benar akan mampu menjadi pusat peradaban. Ini tentu bukan impian belaka. Karena kalau kita menghitung jumlah sumber daya yang

⁴³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 38

dimiliki pesantren di seluruh Indonesia, tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak mustahil.

Keempat hal di atas tampaknya harus benar-benar dipikirkan oleh lembaga pesantren sehingga keberadaannya bukan hanya sekedar mempertahankan eksistensinya, tetapi lebih dari itu, dengan penyesuaian, akomodasi dan konsesi yang diberikan pesantren pada gilirannya mampu mengembangkan diri, dan bahkan mampu menempatkan diri pada posisi penting sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia.

C. Penutup

Sebagai catatan penutup, satu hal perlu digarisbawahi, bahwa pesantren sebagai wajah asli Islam Indonesia dalam sejarahnya ternyata mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pesantren setidaknya menghadapi dua tantangan besar untuk mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. *Pertama*, tantangan dari pendidikan kolonial Belanda yang memperkenalkan sistem pendidikan modern sekitar paruh kedua abad ke-19. *Kedua*, tantangan dari sistem Pendidikan modern Islam yang dikelola oleh kaum reformis. Namun, pesantren berhasil menunjukkan eksistensinya hingga saat ini, dengan beberapa pembaharuan di berbagai sisi.

Meskipun pada awalnya, pembaharuan tersebut dinilai sebagai krisis identitas sebagai implikasi pembaharuan pesantren. Di satu pihak, pesantren tetap memiliki watak populisnya lantaran elastisnya program pendidikan individual minimal dalam pengajaran ekstrakurikuler berbentuk pengajian; di pihak lain, kecenderungan untuk menumbuhkan pendidikan berwatak elitis juga berjalan cukup kuat. Krisis identitas ini sebagai akibat dari kesulitan mendamaikan kedua watak yang saling bertentangan ini hingga sekarang belum teratasi.

Namun demikian, dialog-dialog dengan tradisi, adat, modernisasi dan sistem yang ada di masa-masa awal perkembangan dan proses selanjutnya hingga pesantren mampu bertahan hingga saat ini adalah bukti sejarah tak terbantahkan. Pembaharuan pesantren dilakukan sejatinya tidak untuk dimaksudkan sebagai sekuralisasi pesantren, tetapi justru untuk mengangkat derajat lulusan pesantren agar bisa setara dengan lulusan sekolah sekuler. Dan hal tersebut meniscayakan adanya pembaruan dalam berbagai sisi, meski masih tetap mempertahankan sistem-sistem lama yang masih dianggap relevan.

Kini, yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana merumuskan kembali peran-peran sosial pesantren agar keberadaannya mampu memberikan sumbangan nyata terhadap masyarakat sekitarnya. Tanpa peran yang nyata, signifikansi pesantren dikhawatirkan akan meredup. Untuk itu, pembacaan dan pemaknaan terhadap *turast* (tradisi) dalam bentuk *al-qadim al-shalih* tersebut akan berimplikasi terhadap urgensi pengembangan *al-jadid al-aslah*. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena rumusan nilai-nilai semacam kemandirian misalnya, menuntut kearifan pesantren untuk selalu menyikapi perubahan dan meletakkannya sebagai suatu kemestian yang harus dijalani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ismail S., dkk (ed), *Ajakan Suci*, ttp, LTN-NU DIY, 1995
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995
- Assegaf, Abd. Rachman, *Pendidikan Islam Kontekstual* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Asror, Ahidul, "Ritual Islam Tradisional: Rekonstruksi Nilai Lokal dan Proses Pembentukannya", *ISTIQRO'*, *Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Volume 06, Nomor 01, 2007
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- Balitbang Depag RI, *Pesantren, Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi*, Jakarta, Balitbang dan Diklat Depag RI dan Labsosio UI, 2009
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1995
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, LP3ES, 1985
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva YM, dkk., Bandung, Mizan, 2001
- Haedari, H.M. Amien (ed.), *Pesantren dan Peradaban Islam*, Jakarta, Puslitbang Pend. Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010
- HS, Mastuki. dkk., *Manajemen Pondok Pesantren* Jakarta, Diva Pustaka, 2003
- Langgulong, Hasan, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1988
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta, Paramadina, 1997
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS, 1994
- Mestoko, Sumarsono, et. al., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996
- Muzadi, Hasyim, *Nahdlatul Ulama, di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* Jakarta, Logos, 1999
- Nafi', M. Dian dkk., *Praksis Pembelajaran Pesantren Tkp*, ITD-Forum Pesantren-Yayasan Selasih, 2007
- Paisun, "Dinamika Islam Kultural (Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal)" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS ke-10) di Banjarmasin 1-4 November 2010* Jilid 1, tt,tp.
- Purwadi, Slamet Johanes dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pesantren dan Tantangan Modernitas di Indonesia*, Laporan Penelitian, dalam <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-04.pdf>., diakses 28 Juni 2015
- Qomar, Mujamil, *Menggagas Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014

- Qomar, Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta, Erlangga, 2005
- Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, Jakarta, LP3ES, 1985
- Rahardjo, Dawam (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta, LP3ES, 1995
- Raihani, “Islam dan Kemajemukan Indonesia (Studi Kasus Pesantren dan Pendidikan Multikultural)” dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS ke-10) di Banjarmasin 1-4 November 2010* Jilid 2, tt,tp.
- Rokhmad, “Pesantren Salaf di Tengah Pragmatisme”, *Jurnal Kebudayaan dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 18. No. 2 Tahun 2003
- Salehudin, Ahmad, “Dilema Pesantren Salaf di Tengah Penetrasi dan Pragmatisme Masyarakat; Studi Kasus Pondok Pesantren al-Falah Jember Jawa Timur”, *Laporan Penelitian Sosial*, Jakarta, Depag, 2007
- Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* Jakarta, Depag RI, 1996
- Saridjo, Marwan, dkk., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta, Darma Bakti, 1983
- Suwito dan Fauzan (ed.), *Perkembangan Pendidikan Nusantara (Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M)*, Bandung, Angkasa, 2004
- Syamsuddin, Maimun, “Hermeneutika Cangkolang dalam Proses Pendidikan Berbasis Moral” *Jurnal Edukasi*, Sumenep, diakses di <http://jurnal-edukasi.blogspot.com>, tanggal 28 Juni 2015
- Thoaha, Zainal Arifin, *Runtuhnya Singgasana Kyai; NU, Pesantren dan Kekuasaan, Pencarian Tak Kunjung Usai*, Yogyakarta, Kutub, 2003
- Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren*, ttp, CV. Dharma Bhakti, tt.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta, LkiS, 2004